

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi dan Implementasi kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, SMA Unggul Garuda dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahan hukum yang di gunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025, serta sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sah dalam hierarki peraturan perundang undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Keberadaan SMA Unggul Garuda merupakan bentuk Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan unggulan yang berfokus pada pengembangan sains dan teknologi, kepemimpinan, dan daya saing global, namun demikian terdapat tantangan yang perlu di perhatikan seperti, potensi kesenjangan pendidikan, ketimpangan antara sekolah unggulan dan reguler, oleh karena itu pelaksanaan kebijakan ini sesuai prinsip keadilan, pemerataan dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 sejalan dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, namun implementasinya menghadapi persoalan kewenangan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi untuk menjamin kepastian hukum, pemerataan, dan keadilan pendidikan.

Kata Kunci : Eksistensi dan Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 SMA Unggul Garuda. Sistem Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the existence and implementation of public policies contained in Presidential Regulation Number 116 of 2025 concerning the implementation of Garuda Superior Senior High School, Garuda Superior Senior High School in the Indonesian national education system. The problems studied include the suitability of Presidential Regulation Number 116 of 2025 with Law Number 116 of 2003 concerning the national education system and its implementation in the implementation of senior high education. This study uses a normative research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The legal materials used consist of primary and secondary legal materials in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Presidential Regulation Number 116 of 2025, as well as secondary in the form of books, journals, and relevant literature. The research results show that, legally, Presidential Regulation No. 116 of 2025 has a legitimate standing within the hierarchy of laws and regulations and does not conflict with the National Education System Law. The existence of Garuda Superior High School (SMA Unggul Garuda) is a form of government policy implementation to improve the quality of human resources through superior education that focuses on the development of science and technology, leadership, and global competitiveness. However, there are challenges that require attention, such as the potential for educational disparities and disparities between superior and regular schools. Therefore, the implementation of this policy is in accordance with the principles of justice and equity in the national education system. Presidential Regulation Number 116 of 2025 is a legally valid educational policy that supports the improvement of human resource quality, with its implementation requiring coordination, equity, and fairness within the national education system.

Keywords: Existence and Implementation of Presidential Regulation No. 116 of 2025, Garuda Superior High School, National Education System.